



Alasan Rusia Melibatkan Diri dalam Konflik Bersenjata Suriah Tahun 2011-2015

Dita Arum Kusumastuti
Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Arab Spring which was happened in 2011 had ceated nationwide protest movement of the Syrian people to throw the regime of the President Bashar Al Assad. The conflict that was, at first, only protest then turned into armed conflict where the government, opposition and terrorism groups such as ISIS and Jabhat Al Nusra involved. The number of the deaths caused by the conflict were then called by the UN as crime against humanity. The UN initiated Geneve Peace Talks as an agenda to hold a political transition towards Bashar Al Assad's regime. The effort was rejected by Russia Federation. In 2013, the U.S. and its alliance deployed its military forces in Syria to suport opposition group while in 2015 Russia then responded to the U.S. action by deploying its military troops in order to support the regime of Bashar Al Assad. This research is aimed to explain the motives of why Russia involved in the Syrian armed conflict. The research used qualitative method and Offensive Realism Theory by John J. Mearsheimer. The result of this research is that the involvement of Russia was meant to exercise its geopolitical influence in the Middle East and to repress the expansion of U.S. influence in Syria.

Keywords: *Russia, United States, great power, geopolitical influence, armed conflict*

Pendahuluan

Arab Spring merupakan fenomena yang memunculkan pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada awalnya fenomena tersebut terjadi di Mesir, Aljazair, Maroko, Bahrain, Yordania, Libya, dan Libanon. Kemudian pada tahun 2011 fenomena tersebut tiba di Suriah akibat dari *spillover effect* yang ditimbulkan dari negara-negara di sekitarnya. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Suriah merupakan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Bashar Al Assad yang telah lama menganut sistem otokrasi untuk mundur.

Pemberontakan-pemberontakan tersebut bertransformasi menjadi konflik bersenjata internal yang melibatkan kelompok pemerintah dan kelompok oposisi yang kemudian semakin diperkeruh dengan kehadiran kelompok-kelompok terorisme seperti ISIS dan Jabhat Al Nusra. Kelompok terorisme tersebut juga memiliki obsesi untuk memerangi pemerintah dan mendirikan negara yang berbasis kekhalfahan di wilayah Timur Tengah.

Menurut *Center for Documentation of Violations in Syria*, sejak tahun 2011 hingga 2015 jumlah korban tewas diakibatkan konflik bersenjata tersebut telah mencapai 195,545 jiwa. Dengan banyaknya jumlah korban dalam konflik tersebut, Sekjen PBB, Ban-Ki Moon, menyebut bahwa konflik yang terjadi di Suriah sudah masuk dalam kategori krisis

kemanusiaan terburuk yang pernah terjadi setelah Perang Dunia II. Perhatian dunia internasional pun kemudian mengarah pada Suriah dengan tujuan upaya resolusi konflik.

Upaya-upaya yang dilakukan salah satunya dengan mengadakan *Geneve Peace Talks* pada tahun 2013 untuk membicarakan upaya perdamaian dan resolusi konflik Suriah oleh PBB dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian menginisiasi adanya transisi politik di Suriah untuk menurunkan Presiden Bashar Al Assad yang dianggap tidak berkompeten lagi sebagai pemimpin negara untuk menyelesaikan konflik negaranya sendiri. Amerika Serikat juga menganggap Bashar Al Assad telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan secara terorganisir dan sistematis melakukan tindakan yang cenderung agresif terhadap kelompok pemberontak Suriah dengan cara penyerangan, pembunuhan, dan penghilang paksaan.

Upaya tersebut melahirkan inisiasi rancangan *draft* resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2254 untuk melakukan transisi politik Suriah. Hal tersebut kemudian diveto oleh Rusia. Rusia berasumsi bahwa transisi politik untuk Suriah tidak akan mengakselerasi perdamaian. Rusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak tepat. Hal yang harus dilakukan oleh dunia internasional adalah dengan memberikan dukungan terhadap Pemerintah Suriah dan membantu mengembalikan kedaulatan negara berbasis *statehood* sebab, menurut Rusia, hanya Pemerintah Suriah yang mampu memperbaiki keadaan Suriah seperti semula.

Pada tahun 2014, Amerika Serikat memimpin sebuah koalisi anti-ISIS bersama dengan aliansinya yang bertujuan untuk memerangi terorisme. Menurut McKelvey (2015) dalam artikelnya, Amerika Serikat juga terindikasi melakukan pendanaan terhadap kelompok *Free Syrian Army*. Hal tersebut dilakukan Amerika Serikat sebab dengan mendukung kelompok oposisi berarti Amerika Serikat membantu dalam penegakan nilai-nilai demokratis dalam upaya melengserkan pemerintahan yang bersistem otokrasi. Kemudian menurut Lister (2015 : 8), Amerika Serikat juga memberikan pelatihan kemiliteran terhadap kelompok tersebut yang diselenggarakan di Turki dan Yordania.

Sebagai respon dari aksi Amerika Serikat tersebut, Rusia kemudian menurunkan pasukan militernya di Suriah pada September 2015. Hal tersebut merupakan perwujudan dari komitmen Rusia untuk tetap memberikan dukungannya terhadap pengembalian kedaulatan Suriah dibawah kepemimpinan Presiden Bashar Al Assad. Aksi Rusia tersebut mendapat kecaman dari dunia internasional, termasuk Amerika Serikat dan aliansinya yang beranggapan bahwa tindakan Rusia merupakan tindakan agresif karena keberpihakkannya terhadap Pemerintahan Bashar Al Assad yang dinilai Amerika Serikat dan aliansinya sebagai pemimpin yang diktator dan tidak demokratis. Namun hal tersebut tidak dihiraukan Rusia. Seakan tidak peduli, Rusia tetap menurunkan pasukan militernya dalam konflik bersenjata di Suriah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pada penelitian ini yakni mengapa Rusia melibatkan diri dalam konflik bersenjata di Suriah dengan keberpihakan terhadap Pemerintah Suriah walaupun mendapat tentangan dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan keterlibatan Rusia dalam konflik bersenjata Suriah tersebut, dengan membatasi jangkauan penelitian pada tahun 2011-2015. Tahun 2011 merupakan tahun dimana konflik bersenjata tersebut berawal dan 2015 adalah ketika Rusia melibatkan diri secara militer dengan keberpihakan terhadap Pemerintahan Bashar Al Assad.

Penelitian ini menggunakan teori *offensive realism* dari John J. Mearsheimer yang sepenuhnya mengacu pada bukunya yang berjudul *The Tragedy of Great Power Politics* (2001 : 20 – 166). Mearsheimer lebih menekankan pada kondisi struktur internasional yang anarki mendorong setiap negara untuk selalu bersifat *offensive* demi mencapai kepentingan nasional yang berimplikasi pada keamanan negara. Dalam keadaan struktur

internasional yang semacam ini, tidak ada otoritas yang dapat menjamin keamanan nasionalnya selain negara itu sendiri. Struktur internasional yang anarki tidak memungkinkan adanya *status quo*. Negara akan selalu bersifat revisionis yang direfleksikan dalam pemaksimalan kekuatan militernya sebagai *power* terpenting untuk melakukan ekspansi pengaruhnya. Faktor geografis juga merupakan salah satu komponen terpenting bagi *offensive realism* terutama berkaitan dengan strategi geopolitik dan untuk memainkan peran *great power* dalam menjaga stabilitas serta tatanan dunia.

Penelitian ini menekankan kombinasi dari status Rusia sebagai negara *great power* dalam struktur internasional yang anarki yang mana hal ini berimplikasi pada *state's behaviour* Rusia yang direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya untuk melibatkan diri dalam konflik yang terjadi di Suriah. Untuk mencapai kepentingan dan keamanan nasional, *great power* akan cenderung berperilaku untuk meningkatkan *power* yang dimiliki. Hal ini berbeda dengan *defensive realism* yang berasumsi bahwa negara hanya akan meningkatkan kekuatannya berdasarkan *appropriate amount of power* dan cenderung melakukan *bandwagoning* atau mengekor *great power* yang lain untuk mencapai kepentingannya. Namun pada studi kasus ini, Rusia cenderung melakukan *dangerous movement* seperti yang dikemukakan Mearsheimer dan Rusia tidak memiliki indikasi untuk melakukan *bandwagon* negara-negara lain dalam keterlibatannya dalam konflik bersenjata Suriah.

Pembahasan

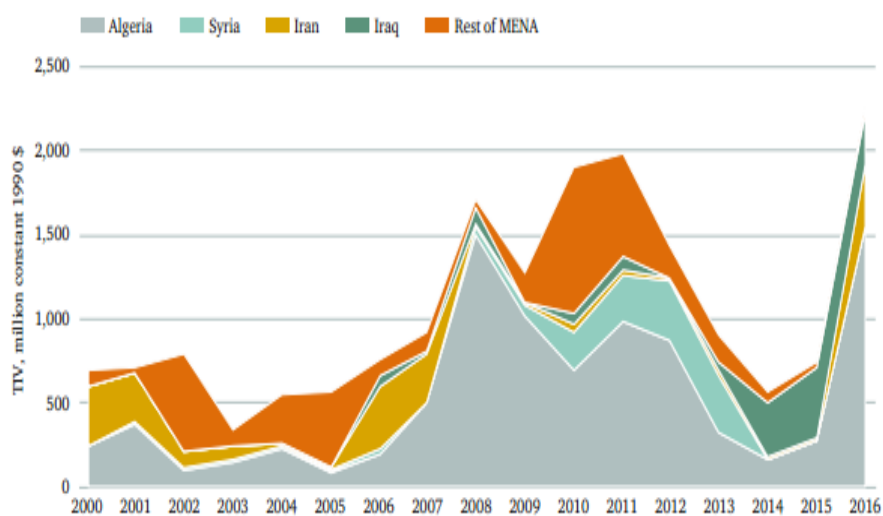
Kepentingan Rusia di Suriah

Suriah merupakan *geopolitical strategic partner* bagi Rusia di Timur Tengah. Faktor geografis merupakan salah satu komponen yang paling ditekankan dalam teori *offensive realism* karena hal tersebut akan berimplikasi pada kondisi geopolitik suatu negara yang berkenaan dengan hubungannya dengan negara-negara lain dalam regionalnya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas dari kemungkinan ancaman yang akan diterima. Konsekuensi dari hal ini adalah persepsi Rusia terhadap pentingnya Suriah di wilayah Timur Tengah untuk membendung pengaruh dominasi Amerika Serikat dan gelombang politik di wilayah tersebut.

Secara historis, Rusia memiliki kedekatan secara politik dengan Suriah sejak masa Uni Soviet. Menurut Omelicheva (2009 : 99 – 101) ada beberapa komponen yang menentukan kebijakan luar negeri Rusia yang kemudian dapat dielaborasi dalam keterlibatannya di Suriah. Untuk merumuskan kebijakan luar negeri, Rusia memperhatikan letak geografis dan kemungkinan ekspansi Amerika Serikat dan NATO yang dianggap sebagai ancaman yang mampu mengubah tatanan dunia. Suriah memiliki posisi geografis yang strategis bagi Rusia. Letaknya di Timur Tengah dianggap mampu membendung pengaruh Amerika Serikat melalui negara-negara sekutunya seperti Arab Saudi, Israel, dan Turki.

Suriah juga merupakan salah satu negara importir peralatan militer terpenting bagi Rusia. Berikut merupakan gambar grafik yang menunjukkan angka ekspor peralatan militer Rusia ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara dimana grafik tersebut menunjukkan letak signifikansi Suriah sebagai negara importir peralatan militer Rusia.

Grafik 1
Ekspor Peralatan Militer Rusia ke Negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara



Sources: SIPRI Arms Transfers Database, 2017; authors' calculations.

Sumber: Richard Connolly dan Cecile Sendstad (2017)

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa posisi Suriah sebagai negara tujuan ekspor peralatan militer Rusia di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara menempati posisi ketiga setelah Irak dan Iran. Aljazair menempati posisi keempat. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara yang lain, keempat negara tersebut merupakan negara pasar dari ekspor peralatan militer Rusia di regional tersebut. Kemudian, berikut secara spesifik disajikan data impor peralatan militer oleh Suriah dari negara-negara pengekspor pada tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Impor Peralatan Militer oleh Suriah

Nama Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
China	15	-	-	-	-	-	15
Iran	45	86	20	10	-	-	161
Rusia	238	282	351	351	-	-	1222

Diolah dari: Stockholm International Peace Research Institute (2017)

Dapat dilihat dari grafik dan tabel di atas bahwa Suriah sendiri sangat mengandalkan ekspor militer Suriah ke negaranya dibanding negara-negara lain. Hal ini membuat Rusia melihat bahwa Suriah merupakan pasar yang cukup penting dalam bidang industri militer.

Selain itu, menurut Nizameddin (2012 : 15 - 24), sampai sekarang Suriah masih menanggung hutang Uni Soviet sebesar 73% dan Suriah merupakan satu-satunya negara yang menjadi rumah bagi pangkalan angkatan laut Rusia di wilayah Timur Tengah setelah runtuhnya Uni Soviet. Pangkalan tersebut berada di kota Tartus. Oleh karena itu, sangat penting bagi Rusia untuk membantu menyelamatkan rezim Bashar Al Assad sebab pergantian rezim berkemungkinan akan menimbulkan dampak pada kebijakan yang telah

ada. Hal yang paling buruk yang mungkin terjadi adalah perluasan pengaruh Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah akan menghilangkan pengaruh Rusia di regional tersebut dan hal ini akan berdampak pada ancaman terhadap salah satu *strategic partner* Rusia yang lain yaitu Iran.

Keterlibatan Amerika Serikat di Suriah

Dalam teori *offensive realism*, negara-negara *great power* mempunyai kecenderungan untuk saling takut terhadap satu sama lain. Sistem internasional yang anarki menyebabkan negara bisa saja bersikap *offensive* untuk mencapai keamanan dan kepentingan nasionalnya karena tidak ada jaminan suatu negara untuk tidak meningkatkan kapabilitas *power* yang dimiliki. Hal ini menjadikan adanya ancaman bagi negara lain. Terlebih lagi untuk *great power*. Suatu *great power* tidak dapat memastikan intensitas *great power* lain untuk tidak memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Perilaku tersebut merupakan sesuatu yang alami dalam konstelasi politik *great power*.

Berangkat dari hal tersebut, Rusia dan Amerika Serikat saling memandang satu sama lain sebagai negara *great power*. Hal ini sudah menjadi sebuah tatanan dalam *world order* pasca Perang Dingin bahwa Rusia dan Amerika Serikat merupakan negara-negara dengan power yang berimbang namun memiliki ideologi yang berseberangan. Berdasarkan *Global Fire Power* (2016), baik Amerika Serikat dan Rusia sama-sama memiliki kapabilitas militer terkuat di dunia secara kualitas maupun kuantitas. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dan Rusia menduduki peringkat kedua. Namun, menurut *Arms Control Association* (2017), berdasarkan kekuatan nuklir, Rusia menduduki peringkat pertama dan Amerika Serikat menduduki peringkat kedua.

Perilaku *great power* mendorong *great power* untuk menjadi *leading states of the world* dengan konsekuensi *buck-passing* terhadap peristiwa-peristiwa internasional. Dalam konflik yang terjadi di Suriah, keterlibatan kedua *great power* ini memicu ketegangan dengan memberikan dukungan dan keberpihakan kepada dua aktor konflik yang saling bermusuhan. Rusia dengan dukungannya terhadap Pemerintahan Bashar Al Assad, sedangkan Amerika Serikat dengan dukungannya terhadap kelompok *Free Syrian Army*. Menurut Kuncahyono (2012 : 80), Amerika Serikat menyatakan bahwa Bashar Al Assad telah kehilangan legitimasi sebagai seorang pemimpin negara dan justru menjadi faktor utama mengapa konflik bisa terjadi sehingga transisi politik harus terjadi.

Sementara itu, di lain pihak, Rusia menolak keras pernyataan Amerika Serikat tersebut dengan memberikan tanggapan bahwa dengan menjatuhkan Rezim Bashar Al Assad tidak akan mengakselerasi perdamaian Suriah bila dilihat dari apa yang telah terjadi di Libya dimana konflik tetap saja terjadi meskipun Presiden Muammar Gaddafi telah dihukum mati. Bila dilihat dari kacamata *offensive realism*, penerjunan pasukan militer Rusia di Suriah pada tahun 2017 merupakan suatu bentuk agresivitas Rusia sebagai *great power* dengan melakukan *dangerous movement* sebagai upaya untuk menahan ekspansi pengaruh Amerika Serikat di Suriah. Suriah yang telah lama menjadi *geopolitical strategic partner* bagi Rusia memiliki peran untuk membendung ekspansi pengaruh Amerika Serikat dan NATO di wilayah Timur Tengah.

Implikasi “Vedushskie Mirovye Derzhavy” dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia

Kebijakan luar negeri merupakan kebijakan suatu negara yang merefleksikan perilaku negara sebagaimana negara tersebut mempersepsikan kepentingan dan keamanan nasionalnya. Kebijakan luar negeri juga merupakan kebijakan atau sikap politik suatu negara terhadap negara lain guna mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Reichwein (2016 : 20), karakter Rusia sebagai *centrality of state* atau negara sebagai pusat membuat

semua kepentingan negara hanya diakomodasi oleh pemimpin tertinggi negara yang tidak lain adalah presiden.

Menurut Mankoff (2007 : 155), *vedushchie mirovye derzhavy* merupakan pengertian dari *leading states of the world* dimana negara-negara ini mempunyai andil untuk memimpin dan bertanggung jawab terhadap konstelasi perpolitikan dunia. Status Rusia sebagai *vedushchie mirovye derzhavy* merupakan salah satu implikasi Rusia sebagai negara *great power* dimana Rusia mempunyai hak untuk menjaga stabilisasi tatanan global.

Tatanan dunia yang multipolar membuat Rusia menjadi agresif dalam mengambil keputusan politik luar negerinya. Hal ini dikarenakan bahwa sebagai negara *great power*, tidak ada cara lain untuk mempertahankan *power* yang dimiliki selain dengan lebih aktif dan agresif dalam kebijakan luar negeri. Rusia mengklaim untuk bahwa kepentingan nasional merupakan hal terpenting yang harus dicapai dengan cara mempertahankan pengaruhnya sebagai salah satu *leading states* dalam hubungan internasional.

Kedekatan Rusia dengan Suriah yang telah berlangsung sejak lama memberikan Suriah peran tersendiri bagi Rusia terutama berkaitan dengan pembendungan ekspansi Amerika Serikat dan NATO khususnya di wilayah Timur Tengah. Menurut Kreutz (2010 : 12 – 23), ekspansi pengaruh Amerika Serikat dan NATO tentu saja dapat membahayakan posisi Rusia dalam hubungan internasional. Hal ini dikarenakan Rusia menganggap bahwa ekspansi pengaruh Amerika Serikat dan NATO dapat mengganggu upaya Rusia dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, Rusia menganggap bahwa tindakan Amerika Serikat beserta aliansinya tersebut merupakan tindakan yang dapat merubah tatanan global. Perubahan tatanan global akan menggeser posisi Rusia dan akan berimplikasi pada keamanan nasionalnya.

Banyaknya serangan militer yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah beserta sekutu-sekutunya kepada kelompok oposisi merupakan suatu indikasi dari keterlibatan *offensive* Rusia sebagai negara *great power*. Kepercayaan Rusia bahwa negara *great power* adalah negara-negara *vedushchie mirovye derzhavy* menjadi faktor struktural Rusia dalam menjalankan perannya sebagai *great power*. Suriah yang menjadi *strategic partner* bagi Rusia tentu menjadi catatan tersendiri bagi Rusia setelah kedatangan Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi di Suriah. Ketidakpastian struktural seperti hal tersebut memaksa Rusia untuk melakukan *self-help* bagi dirinya sendiri.

Kedatangan Amerika Serikat dalam konflik Suriah akan menjadi *shifting policy* bagi Suriah dan negara-negara Timur Tengah sebab adanya kemungkinan hilangnya pengaruh geopolitik Rusia di Suriah mengingat hal tersebut merupakan salah satu kepentingan nasional Rusia yang berimplikasi pada keamanan nasional. Rusia merupakan negara yang berhati-hati dalam menentukan politik luar negerinya sebab fokus utamanya adalah Amerika Serikat. Namun, hal tersebut bukan berarti Rusia tidak mengambil kesempatan apabila berkaitan dengan pemaksimalan *power* yang dimiliki.

Kesimpulan

Keterlibatan Rusia dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan suatu bentuk dari upaya geopolitik Rusia untuk membendung ekspansi pengaruh Amerika Serikat dan upaya *buck-passing* Rusia sebagai *great power* terhadap Suriah. Sifat Rusia sebagai *great power* yang akan selalu bersifat *offensive* dengan kapabilitasnya untuk selalu meningkatkan *power* ketika struktur internasional yang bersifat anarki tidak dapat menjamin *survival*-nya.

Penting bagi Rusia untuk membantu menyelamatkan rezim Bashar Al Assad. Sejalan dengan pendekatan *state-centric*, dengan mengembalikan kedaulatan Suriah, maka Suriah dapat menyelesaikan konflik internalnya sendiri sebab negara merupakan unit tertinggi dalam tatanan internasional. Kemudian, hubungan perdagangan antara Rusia dan

Suriah dan adanya pangkalan laut Rusia di Suriah yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, merupakan bentuk-bentuk kepentingan Rusia yang berkaitan erat dengan keamanannya dalam segi ekonomi dan militer. Dengan kedatangan Amerika Serikat dan sekutunya di Suriah yang menyatakan kontra terhadap rezim Bashar Al Assad, menempatkan Rusia dalam kondisi ketidakpastian terhadap *survival*-nya dan mengancam kepentingan Rusia di Suriah.

Sikap Rusia yang cenderung melakukan *dangerous movement* tersebut merupakan refleksi dari sifat negara yang *self-help* dalam struktur internasional yang anarki. Sebagai *great power*, tindakan Rusia merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap Suriah dimana Suriah merupakan *geopolitical strategic partner* Rusia di wilayah Timur Tengah. Menyelamatkan kedaulatan Suriah berarti menyelamatkan kepentingan Rusia di Suriah dan pengaruhnya di Timur Tengah. Suriah merupakan jembatan penghubung Rusia dengan Timur Tengah sekaligus pembendung pengaruh Amerika Serikat di regional tersebut.

Selain itu, asumsi Rusia sebagai negara *veduschie mirovye derzhavy* membentuk karakter Rusia yang bersifat *offensive* dalam kebijakan luar negerinya di Suriah dengan melakukan tindakan yang dianggap Amerika Serikat sebagai *dangerous movement*. Namun hal ini dianggap sebagai tindakan yang tepat bagi *great power* untuk merespon *great power* yang lain ketika keberadaannya telah mengancam kepentingannya di negara lain yang berimplikasi pada keamanan nasionalnya. Meskipun teori *offensive realism* mengakui bahwa menjadi hegemon bukan hal yang mudah, namun pengaruh geopolitik merupakan langkah awal yang esensial sebelum mencapai hegemoni. Oleh karena itu, tindakan Rusia dalam konflik di Suriah dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan *offensive*, untuk mempertahankan dan memperkuat pengaruhnya di Suriah sebagai upaya untuk menjadi penguasa tunggal di wilayah Timur Tengah.

Jadi, keterlibatan Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah adalah bentuk kebijakan luar negeri untuk menguji *power*-nya sebagai respon dari keterlibatan Amerika Serikat sebelumnya dan mencegah kemungkinan ekspansi pengaruh Amerika Serikat melalui transisi politik untuk Pemerintah Suriah. Sebab, transisi politik Suriah diasumsikan sebagai ancaman oleh Rusia karena ada kemungkinan hilangnya pengaruh Rusia di Suriah digantikan oleh pengaruh Amerika Serikat. Kehilangan Suriah berarti kehilangan akses untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di Timur Tengah dimana hal tersebut merupakan kunci utama utama untuk menjadi penguasa tunggal di Timur Tengah.

Referensi

- Arms Control Association. (2017). "Nuclear Weapons : Who Has What at A Glance". Dalam <https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat> diakses pada 12 Agustus 2017.
- Center for Documentation of Violations in Syria. "Statistics for the number of martyrs". Dalam <https://www.vdc-sy.info/index.php/en/>. Diakses pada 9 Mei 2016.
- Connolly, Richard, Cecile Sendstad. (2017). "Russia's Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance of Arms Exports for Russia". Chatham House.
- Global Fire Power. (2016). "Russia Military Strength". Dalam <http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=united-states-of-america&country2=russia&submit=COMPARE>. Diakses pada 15 Juni 2016.
- Kuncahyono, Trias (2012). "Musim Semi Suriah". Jakarta. Kompas Gramedia
- Kreutz, Andrej. (2010). "Syria: Russia's Best Asset in the Middle East". Paris. IFRI Russia/NIS Center.
- Lister, Charles. (2016) "The Free Syrian Army: A Decentralized Insurgent Brand". Washington D.C.. Brookings Institution.

- Mankoff, Jeffrey. (2009). "Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics". Maryland. Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Mearsheimer, John J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York. W.W. Norton & Company, Inc.
- McKelvey, Tara. (2015). "Arming Syrian Rebels: What the US went wrong". Dalam <http://www.bbc.com/news/magazine-33997408> diakses pada 13 Maret 2017.
- Nizameddin, Talal. (2012). "Russia's political winter leaves Syria's spring on ice". Milan. Istituto per Gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) – Analysis.
- Omelicheva, Mariya. (2011). "Russian Foreign Policy: A Quest for Great Power Status in Multipolar" dalam Ryan K. Beasley, dkk. *Foreign Policy in Comparative Perspective*. Los Angeles. Sage Publications
- Reichwein, Alex. (2016). "Explaining Russia Foreign Policy from a Neoclassical Realist Perspective". Justus-Liebig-Universitat Giessen.
- SIPRI. (2017). "Military Expenditure Database". Dalam <http://armstrade.sipri.org/milex> diakses pada 12 Agustus 2017.